

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jepang merupakan salah satu negara maju yang terletak di kawasan Asia Timur. Jepang sendiri telah mencapai suatu perkembangan yang begitu pesat, hingga saat ini menyandang predikat sebagai kekuatan ekonomi di Regional Asia. Negara yang memiliki julukan Negeri Sakura ini memiliki sejarah perkembangan perekonomian yang panjang. Berhasilnya Jepang dalam membangun ekonomi negaranya tidak terlepas dari proses historis negara tersebut, seperti politik isolasi yang mereka terapkan selama kurang lebih 250 tahun.<sup>1</sup> Setelah berakhirnya politik isolasi di Jepang, kemudian muncul suatu gerakan perubahan yang disebut dengan Restorasi Meiji (1868-1885). Restorasi Meiji sendiri merupakan sebuah gerakan modernisasi, dimana negeri Sakura ini melakukan beberapa hal perubahan yang dapat dikatakan cukup mendasar. Karena, dalam pemerintah yang terjadi pada periode Meiji, memberikan banyak pergantian pandangan bagi bangsa Jepang.<sup>2</sup>

Pada pemerintahan Meiji, bangsa Jepang mulai tertarik untuk dapat meningkatkan perekonomian dan juga memajukan sektor industrinegaranya. Tak hanya ekonomi, dalam hal perubahan tersebut Jepang juga melakukan pembaharuan dibidang sosial dan politik, mengingat adanya kondisi yang menghambat pembangunan yang berlangsung dalam waktu cukup lama pada zaman Tokugawa. Terdapat adanya penghapusan sistem pangkat feodal, dan perbedaan kasta

---

<sup>1</sup>Setyo Adji, Hery. 1997. "*Proses Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Historis Komparasantara Indonesia Dan Jepang*". JEP Vol. 2 No. 3

<sup>2</sup> Ibid,

antara samurai, pedagang, tukang, dan petani, saat berlangsungnya pemberbaharuan bidang sosial dan politik Jepang.

Setelah Jepang berhasil dalam menerapkan gerakan modernisasi, keadaan ekonomi Jepang pun kembali berubah pasca kekalahannya dalam menghadapi Perang Dunia II. Selama perang, Jepang tidak memperoleh suplai bahan mentah dari luar negeri, yang mengakibatkan pembatasan produksi Industri di Jepang. Tak hanya itu, Perang Dunia II, berakibat pula pada kerusakan fasilitas produksi dan perumahan yang diakibatkan oleh pengeboman, dalam terjadinya perang tersebut Jepang pun kehilangan asset dengan harga kurang lebih ¥ 1,38 triliun pada indeks harga tahun 1947.<sup>3</sup>

Berakhirnya Perang Dunia II, Jepang juga terpaksa harus tunduk pada negara yang berkuasa, yaitu Amerika Serikat. Perang Dunia II pun mampu mengakibatkan perubahan orientasi negara Jepang, yang semula kuat dalam militer berubah orientasi menjadi negara *soft power*. Pada saat itu, bangsa Jepang mulai berfikir bagaimana cara untuk membangun kembali negaranya tanpa harus mengusik kekuasaan Barat. Hingga pada akhirnya Jepang memutuskan untuk mulai bangkit dengan melakukan perbaikan ekonomi dan mengesampingkan kekuatan militer yang dimilikinya. Pasca Perang Dunia II juga memunculkan dua doktrin sebagai orientasi kebijakan politik luar negeri Jepang untuk perkembangan selanjutnya. Dua doktrin tersebut yaitu Yoshida dan Fukuda. Kebijakan itu yang kemudian mendorong Jepang menjadi bangsa yang lebih banyak

---

<sup>3</sup>Sayidiman, Suryohadiprojo. 1987. "Belajar dari Jepang Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjoangan Hidup", UI-PRESS, hal 83

membangun interaksi dengan negara-negara lain. Namun, pada saat itu, Jepang cenderung lebih berkonsentrasi dalam pembangunan ekonomi melalui sektor industri yang telah lama ada dalam membangun kembali perekonomiannya yang pernah jatuh. Hingga lambat laun, mulai muncul suatu ekonomi kreatif Jepang pada sektor Pariwisata.

Perkembangan sektor pariwisata negara Jepang, sebenarnya sudah mulai terbuka sejak tahun 1867 dengan ditandai oleh datangnya beberapa wisatawan asing ke Jepang, hanya saja dengan keterbatasan tujuan (yang kebanyakan dari mereka datang hanya untuk berdagang). Banyak hal yang melatar belakangi mengapa Jepang mulai tertarik untuk mengembangkan sektor pariwisata, salah satunya yaitu untuk membantu membangun ekonomi domestik Jepang selain dari sektor industri.

Sektor pariwisata sendiri merupakan satu dari sekian banyak bidang yang dapat menopang perekonomian di berbagai negara, salah satunya Jepang. Hal tersebut disebabkan karena sektor pariwisata dapat dikatakan sebagai *icon* penting yang dimiliki suatu negara dan dirasa dapat menyumbangkan pendapatan perkapita selain yang berasal dari industri dan perdagangan. Adanya sektor pariwisata, bukan hanya perekonomian suatu negara saja yang terbantu, namun pariwisata juga memiliki peran yang dapat membantu meningkatkan integrasi sekaligus merekatkan hubungan antar bangsa. Pasca Perang Dunia II, Jepang mulai terbuka dan tertarik untuk mengembangkan sektor pariwisatanya yang disebabkan oleh kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Namun, sektor pariwisata Jepang pada saat itu dinilai masih sangat minim wisatawan asing yang berkunjung, terbukti pada data yang ada di *Japan National Tourism Organization* mulai dari tahun 1964 terdapat 352.832 orang yang berkunjung ke Jepang, lalu

tahun 1980 terdapat 1.316.632 orang dan tahun 1990 terdapat 3.235.860 orang yang berkunjung ke Jepang.<sup>4</sup>

Meski telah terdapat adanya penambahan jumlah kunjungan, namun pada tahun 1980 sampai 1990an, Negeri Sakura ini masih tercatat sebagai negara yang hanya aktif dalam menyumbangkan angka wisatawan ke negara lain. Negara Jepang dirasa lebih dominan dalam menerapkan *Outbond Tourism* dan memandang sebelah mata pada sektor pariwisata. Dengan alasan bahwa mereka menilai sektor industri dan perdagangan masih sangat berperan besar dalam kemajuan perekonomian Jepang dibandingkan sektor pariwisatanya.<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu, Negeri Sakura ini mulai tertarik untuk mengembangkan *Inbound Tourism*. Di mana pada Desember 2002, Perdana Menteri Koizumi menerapkan *The Inbound Tourism Initiative of Japan* yang berisikan mengenai berbagai rencana besar Jepang di sektor pariwisata, yang dapat mempermudah wisatawan asing untuk berkunjung. Pada tahun 2003, dengan munculnya “*Visit Japan*” menjadi salah satu bidang kampanye yang dilakukan untuk promosi di berbagai negara. Hal tersebut merupakan suatu penanda bahwa sektor pariwisata negara Jepang mulai berkembang. Kebijakan *Inbound Tourism* sendiri dalam kiprahnya selalu menunjukkan perkembangan hingga pemerintahan Shinzo Abe. Pada tahun 2012, Shinzo Abe terpilih kembali menjadi Perdana Menteri terpercaya di

---

<sup>4</sup>JNTO Japan National Tourism Organisation. “*Japan Tourism Statistic*” diakses di <https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#graph--inbound--travelers--transition> pada tanggal 27 oktober 2018

<sup>5</sup>“1 BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pariwisata di Jepang-ETD UGM” (SKRIPSI) diakses di <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/111474/potongan/S1-2017-335714-introduction.pdf> pada 28 mei 2018

Jepang. Shinzo Abe merupakan Perdana Menteri yang memiliki peran penting dalam melakukan perubahan terhadap kemajuan pariwisata Jepang.<sup>6</sup> Salah satu kebijakan Jepang dalam perkembangan bidang pariwisata pada Era Perdana Menteri Shinzo Abe adalah *Exemption of visa* (EOV).

Di samping itu, Jepang juga mulai melakukan berbagai aliansi dengan negara-negara lain salah satunya Indonesia. Pada tahun 1958 tepatnya pada bulan April menjadi suatu bulan bersejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan Jepang.<sup>7</sup> Di mana pada saat itu dimulailah hubungan bilateral antar keduanya dengan ditandai oleh Penandatanganan Perjanjian dan Pampasan Perang. Selanjutnya pada tahun 1963 mulai dibuka jalur penerbangan antara Jepang dengan Indonesia. Jepang dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki hubungan bilateral sangat baik. Dalam sejarahnya, mereka memiliki hubungan kerjasama diberbagai sektor. Salah satunya yaitu perekonomian. Pada sektor ekonomi, Jepang dan Indonesia menitik beratkan pada bidang perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi. Untuk sektor perdagangan, Indonesia merupakan penyumbang surplus besar impor ke Jepang berkisar US\$ 6.5 miliar (tahun 2007). Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, tekstil dan produk tekstil, mesin, dan perlengkapan listrik. Selain itu, dalam bidang investasi terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia. Perusahaan tersebut memperkerjakan lebih dari 32 ribu pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di

---

<sup>6</sup> Ibid,

<sup>7</sup>Al Jamil, Aditya. 2014. "*Motivasi Pemerintah Jepang dalam Rencana Pemberian Bebas Visa Bagi Turis Asal Indonesia*". JOM FISIP, Vol.2 No.2

Indonesia. Sementara pada kerjasama ekonomi, Jepang merupakan negara penyumbang ODA (bantuan pembangunan tingkat pemerintah) terbesar untuk Indonesia. Relasi bantuan untuk tahun 2006 yaitu pinjaman ¥ 125.2 miliar, bantuan hibah ¥ 5,4 miliar, kerjasama teknik ¥ 7,8 miliar.<sup>8</sup>

Lambat laun, Hubungan bilateral antara negara Jepang dengan Indonesia pun semakin menunjukkan suatu perkembangan. Seperti pada bidang sosial-budaya, yang mengakibatkan tercetusnya kerjasama dibidang pariwisata. Pada bidang pariwisata, hubungan antar keduanya mulai terjalin sejak tahun 2003, ketika Presiden Republik Indonesia, Ibu Mega Wati Soekarno Puteri berkunjung ke Jepang dan melakukan penandatanganan perjanjian antar kedua negara.<sup>9</sup> Hingga Jepang kemudian memberikan beberapa kemudahan untuk warga negara Indonesia yang ingin berkunjung. Seperti penerapan kebijakan *Exemption Of Visa*. *Exemption of visa* sendiri merupakan suatu kebijakan bebas visa yang diinisiasi oleh Shinzo Abe pada periode II ia menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Kebijakan bebas visa tersebut secara resmi pertama kali diberlakukan pada 1 Juli 2013 terhadap Malaysia dan Thailand. Malaysia dan Thailand merupakan dua negara pertama ASEAN yang mendapatkan kebijakan bebas visa kunjungan ke Jepang. Bebas visa untuk negara Thailand sendiri berlaku untuk masa tinggal kurang dari 15 hari, sementara itu untuk

---

<sup>8</sup>Kedutaan Besar Jepang di Indonesia,” *Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang*” diakses di [https://www.id.emb-japan.go.jp/birel\\_id.html](https://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html) pada 13 september 2018

<sup>9</sup>Tempo.co “*Indonesia-Jepang Tandatangani Kerjasama Pariwisata*” diakses di <https://nasional.tempo.co/read/20571/indonesia-jepang-tandatangani-kerjasama-pariwisata/full?view=ok> pada 29 Januari 2019

negara Malaysia berlaku untuk kunjungan kurang dari 3 bulan.<sup>10</sup>

Tidak lama kemudian, Menlu Jepang Fumio Kishida mengumumkan bahwa bebas visa kunjungan sementara untuk WNI ke Jepang akan berlaku efektif mulai tanggal 1 Desember 2014.<sup>11</sup> Dari adanya pemberlakuan bebas visa tersebut akan mempermudah WNI untuk berkunjung ke Jepang. Bebas visa kunjungan ini berlaku kurang dari 15 hari dan khusus untuk tujuan berkunjung atau wisata.

Pemberian bebas visa memiliki suatu ketentuan di dalamnya. Di mana bebas visa ke Jepang dapat diterapkan atau digunakan oleh Warga Negara Indonesia yang memiliki *IC Passport/ e-passport* (passport dengan logo chip di bagian sampul depan) sesuai dengan standar ICAO (*International Civil Aviation Organization*), dan telah melakukan registrasi e-paspor di Kantor Perwakilan Negara Jepang (Kedutaan Besar Jepang / Konsulat Jendral Jepang/ Kantor Konsulat Jepang) atau JVAC di Indonesia sebelum keberangkatan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Kompas. 2013. “*Bebas Visa Jepang untuk Thailand dan Malaysia, Bukan Indonesia*” diakses di <https://travel.kompas.com/read/2013/06/27/1527262/Bebas.Visa.Jepang.untuk.Thailand.dan.Malaysia.Bukan.Indonesia> pada 15 September 2018

<sup>11</sup>“*Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia*”, diakses di <https://www.kemlu.go.id/id/berita/informasi-penting/Pages/Bebas-Visa-ke-Jepang-Berlaku-Efektif-1-Desember-Ini.aspx> pada 15 september 2018

<sup>12</sup>“*Bebas Visa dengan Sistem Registrasi Pra-keberangkatan bagi Warga Negara Indonesia Pemegang e-paspor*” diakses di [https://www.id.emb-japan.go.jp/visa\\_waiver2018.html](https://www.id.emb-japan.go.jp/visa_waiver2018.html) pada 28 November 2018

Hal tersebut tentu bukanlah syarat yang sulit untuk didapatkan oleh Warga Negara Indonesia, karena badan Imigrasi Indonesia telah mengeluarkan dua jenis paspor, yaitu paspor biasa dan paspor elektronik. Terdapat perbedaan dari paspor biasa dengan paspor elektronik, seperti dalam bentuk fisiknya hanya terletak pada logo chip dibagian depan paspor. Namun dalam chip yang terdapat di e-paspor tersimpan informasi awal dari seorang WNI yang akan masuk ke wilayah Jepang dalam perekaman data biometrik, dan itu berfungsi sebagai pengganti proses aplikasi visa.<sup>13</sup>

Jepang merupakan negara pemberi kebebasan cukup longgar untuk beberapa negara anggota ASEAN seperti pernyataan yang telah disinggung sebelumnya. Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji, mengingat bahwa Jepang sendiri memiliki latar belakang yang sangat unik dan berbeda dengan negara lain, yaitu dengan adanya politik isolasi Jepang pada Era Tokugawa. Yang pada saat itu, masa isolasi dihubungkan dengan kontrol politik yang ketat dan mengakibatkan negara Jepang sukar untuk bergaul dengan bangsa lain secara fleksibel. Namun seiring berjalannya waktu, saat pergantian pemerintah yang terjadi pada periode Meiji memberikan banyak perubahan pandangan bagi bangsa Jepang.

Berdasarkan pemaparan tersebut memunculkan suatu pertanyaan yang sangat menarik untuk dipecahkan mengenai apa alasan Jepang atau mengapa Jepang memberikan kebijakan *Exemption of Visa* pada negara Indonesiayang secara resmi diberlakukan pada Era

---

<sup>13</sup>Nusantara, Gelora. 2015. “Belajar dari Penerapan Bebas Visa Jepang bagi Warga Negara Indonesia” diakses di <https://www.kompasiana.com/genusa/552c240b6ea834495f8b4605/belajar-dari-penerapan-bvks-jepang-bagi-warga-negara-indonesia> pada 28 November 2018



Perdana Menteri Shinzo Abe II tepatnya pada Desember 2014.

## **B. Rumusan Masalah**

“Mengapa Jepang memberikan Kebijakan *Exemption of Visa* pada Indonesia di Era Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2014?”

## **C. Kerangka Teori**

Untuk dapat menganalisis pokok permasalahan diatas, penulis menggunakan teori sebagai bahan dalam menganalisa permasalahan yang sekiranya dapat menjelaskan tentang maksud dan tujuan negara Jepang memberikan kebijakan Visa Waiver atau pembebasan Visa bagi negara Indonesia. Analisis ini menggunakan model Pembuatan Keputusan. Dalam model pembuatan keputusan, teoritis hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri, yaitu Graham T. Allison, mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri, yaitu *Aktor Rasional, Proses Organisasi, dan Politik Birokratis*. Untuk dapat menjelaskan permasalahan diatas, penulis menggunakan model.

### **1. Aktor Rasional**

Dalam model ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Pada analogi ini, individu diharuskan melalui serangkaian tahap intelektual dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh

berusaha menetapkan pilihan atas alternative yang ada. Unit analisa dalam model pembuatan keputusan ini merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dari situ, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternative haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas alternative tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan model ini digambarkan bahwa dalam melakukan pilihan atas beberapa alternative, para pembuat keputusan menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”. Para pembuat keputusan digambarkan sebagai orang yang selalu siap untuk melakukan perubahan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya dalam menetapkan pilihan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Dalam model ini, para pembuat keputusan dianggap rasional dan pada umumnya dituntut untuk berfikir bahwa suatu keputusan (yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional.<sup>15</sup>

Model aktor rasional cenderung dipilih oleh penulis daripada dua model lain (proses organisasi dan politik birokratis dalam menjawab kajian skripsi ini, karena dalam keadaan Jepang saat munculnya kekuatan-kekuatan industri baru, pemerintah Jepang merupakan suatu aktor yang berperan penting dalam memutuskan kebijakan luar negeri untuk segera mengatasi permasalahan yang terjadi demi kepentingan nasional Jepang sendiri. Pembahasan masalah dengan

---

<sup>14</sup> Mas'oed Mochtar. 1990. *“Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi”* (Jakarta: PT. Ikar Mandiriabadi, hal 275-276.

<sup>15</sup> Ibid,

menggunakan birokrasi politik atau organisasi internasional dirasa akan memperlama waktu pengambilan keputusan dan tindakan. Pada model ini pembuat keputusan atau pemerintah Jepang dianggap rasional dan umumnya berfikir keputusan memang dibuat secara rasional.

## 2. Games Theory

Dalam upaya memahami perilaku negara atau para pembuat keputusan politik luar negeri dalam situasi konflik internasional, para ilmuwan hubungan internasional menerapkan metafora permainan atau *game*. Hubungan antar negara yang bersifat kompetitif atau konfliktual digambarkan seolah-olah seperti seseorang yang sedang bermain catur, poker, bridge atau permainan semacam itu yang lain. Model yang sering disebut *Game Theory* ini menggambarkan bagaimana proses penalaran berlangsung dalam pembuatan keputusan. Asumsi utama yang melandasi model ini adalah bahwa para pemain berperilaku Rasional, yaitu memilih strategi atas dasar pertimbangan untung-rugi dalam pencapaian tujuan yang jelas, namun pada umumnya perilaku dalam proses tersebut dianggap bersifat rasional. Implikasi dari asumsi ini adalah bahwa para aktor itu dianggap punya kemampuan untuk mengetahui semua kemungkinan situasi yang dihadapi, untuk menjabarkan urutan-urutan prioritas tujuan yang hendak dicapai. Asumsi kedua adalah bahwa para pemain yang berhadapan memiliki kepentingan yang bertentangan, walaupun hanya sebagian. Jika kepentingan mereka selaras, maka seorang pemain akan bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. *Game Theory* ini memiliki dua bentuk dasar *Non-Zero Sum Game*, yaitu

permainan yang disebut *Prisoner's Dilemma* dan *Chicken*<sup>16</sup>

Namun pada penelitian ini, penulis lebih memilih menggunakan permainan yang disebut *Chicken*. Karena dalam menganalisis kebijakan bebas visa yang dibuat oleh Jepang lebih cenderung mengarah ke *Chicken Games*. *Chicken* adalah nama permainan berbahaya dikalangan remaja nakal dikota besar Amerika Serikat. Pelaku permainan ini adalah dua pemimping “gang” yang hubungannya kurang harmonis dan bermaksud menunjukkan siapa yang lebih jantan. Dalam model tersebut, pemerintah Jepang diberikan pilihan yang didalamnya terdapat pilihan yang dirasa rasional. Dalam kaitannya dengan teori *Chicken*, politik luar negeri Jepang telah memberikan beberapa pilihan yang telah dianggap memiliki sifat yang rasional dalam penerbitan bebas visa kunjungan yang diberikan kepada negara – negara ASEAN, termasuk Indonesia. Banyak sekali pertimbangan yang dihadapi oleh pemerintah Jepang dengan pemikiran yang rasional atau pengoptimalisasi hasil dari kerugian.

**Table 1 Analisis Pemberian Kebijakan Bebas Visa Kepada Indonesia**

Indikator	Memberikan Bebas Visa kepada Indonesia		Tidak Memberikan Bebas Visa kepada Indonesia	
	Untung	Rugi	Untung	Rugi
Sektor Pariwisata	Menambah wisatawan asing yang berkunjung ke	Terdapat beberapa Wisatawan Asing yang	Ketatnya pengurusan Visa membuat	Minimnya penambahan wisatawan asal negara

<sup>16</sup> Id, at 11

	Jepang  Membuka kesempatan wisatawan untuk lebih mengenal Jepang	menyalahgunakan visa tidak untuk berwisata namun untuk keperluan mencari kerja.	tidak banyak warga negara asing yang mudah keluar masuk Jepang sehingga tidak banyak pula budaya asing yang masuk	Indonesia yang berkunjung ke Jepang karena sulitnya mengurus visa kunjungan
Sektor Ekonomi	Meningkatkan Pendapatan Perkapita negara Jepang	Tidak ditemukan kerugian	Tidak ditemukan keuntungan	Minimnya pendapatan oleh Jepang yang diakibatkan tidak adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung
Aliansi	Semakin mempererat hubungan antar kedua negara	Tidak ditemukan suatu bentuk kerugian	Tidak adanya keuntungan dalam hal tersebut	Kemungkinan peningkatan hubungan kerjasama antar keduanya menjadi biasa
Karakter dari Masyarakat Jepang	Semakin dikenalnya karakter asli dari masyarakat Jepang	Terdapat berbagai budaya asing yang masuk dengan	Terdapat kemungkinan besar terjaganya karakter bangsa	Tidak terdapat kerugian yang signifikan.

		mudah dan bisa saja mempengaruhi karakter asli masyarakat Jepang.	Jepang	
--	--	---	--------	--

Dari analisis sementara data tersebut, terlihat jelas bahwa memberikan kebijakan Bebas Visa kepada Warga Negara Indonesia lebih cenderung menguntungkan bagi Jepang dari pada tidak sama sekali. Meski dengan adanya pemberlakuan kebijakan bebas visa, Jepang mengalami suatu dilema akan karakteristik masyarakatnya yang dapat dipengaruhi oleh negara luar yang masuk ke Jepang, namun dengan diberlakukannya kebijakan Bebas Visa ini lebih memberikan tambahan keuntungan dibanding kerugiannya untuk Jepang dalam berbagai sektor yang ada.

#### **D. Hipotesis**

Asumsi sementara yang dapat ditarik penulis melalui Kebijakan Jepang dalam memberlakukan bebas visa kepada Indonesia yaitu Jepang menerapkan kebijakan *Exemption of Visa* atau pembebasan visa kepada Indonesia karena adanya pertimbangan Rasional dari Perdana Menteri Shinzo Abe untuk, penambahan kunjungan wisatawan asing dan Indonesia, mendapatkan keuntungan ekonomi dari sektor pariwisata, dan sebagai sarana untuk dapat mempererat hubungan bilateral Jepang dan Indonesia.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan adanya pertimbangan rasional dari Perdana Menteri

Shinzo Abe mengenai alasannya memberikan kebijakan bebas visa kepada Indonesia pada tahun 2014.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, agar tidak terlalu luas dalam pembahasan, maka penulis berusaha untuk memberikan batasan dalam penulisan skripsi ini mengenai waktu atau periode tertentu. Periode tersebut dalam proses kebijakan politik luar negeri Jepang pada tahun 2014, namun penulis akan membahas hingga periode 2017. Alasan mengapa pada periode 2014-2017, karena berdasarkan isu kebijakan Jepang dalam memberikan bebas visa kepada Indonesia sesuai dengan judul penelitian ini pembebasan visa yang diberikan kepada Indonesia oleh Jepang ditetapkan pada akhir tahun yaitu pada tanggal 1 Desember 2014, dipilihnya hingga tahun 2017, dengan alasan agar dapat mengetahui perkembangan dari pereratan hubungan bilateral Jepang dengan Indonesia setelah pembebasan Kebijakan Bebas Visa. Pemerintah Jepang telah memutuskan serta memberlakukan *visa waiver* atau bebas visa untuk mempermudah WNI dalam berkunjung ke Jepang tanpa harus mengaplikasikan visa. Hal ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Jepang dalam rangka untuk meningkatkan wisatawan dari Indonesia untuk mengunjungi Jepang dengan mudah. Dalam penelitian, jangkauan penulisan sebelum periode ini mungkin akan sedikit disinggung jika ada yang bersangkutan dengan penelitian ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Data dalam penelitian ini diperkaya melalui studi berbagai tulisan dan literatur terkait dengan latar belakang dari

negara Jepang, pemberlakuan bebas visa di Jepang, serta perkembangan pariwisata Jepang. Data-data lain yang berkaitan dengan pariwisata dikumpulkan dengan tujuan untuk mencari data yang valid dan faktual agar dapat memperkuat objektivitas. Studi pustaka juga dilakukan sebagai landasan argumentasi yang dibangun oleh penulis pada tahap analisis konsep dan data.

## 2. Teknik Analisis Data

Metode yang diterapkan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah metode analisa deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang menekankan pada akurasi kualitas data dengan menjelaskan dan menganalisis hubungan antara data, fakta, dan teori sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menghasilkan penelitian yang valid. Penulis menggunakan metode ini agar dapat menyajikan penelitian yang berjudul *Kebijakan Exemption Of Visa Jepang Terhadap Indonesia Pada Era Shinzo Abe II* secara runtut dan dapat dibuktikan kebenarannya. Karena metode ini menggunakan analisis data, fakta dan teori yang telah ada.

## H. Sistematika Penulisan

Mengenai penulisan dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang akan dibagi dalam beberapa bagian seluruhnya mencakup 5 BAB diantaranya :

**Bab I** merupakan bab pengantar yang didalamnya berisi pendahuluan yang membahas mengenai : Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

**Bab II** merupakan suatu eksplorasi dari Latar Belakang Masalah : Sejarah Perkembangan Perekonomian Negara



Jepang. Terdiri dari, Proses Modernisasi Jepang dari Era Meiji hingga Pasca Perang Dunia II, dan Keadaan Ekonomi Politik Jepang setelah Perang Dunia II dan Pengaruh Doktrin Yoshida dan Fukuda pada Kebijakan Luar Negeri Jepang, dan perkembangan keadaan pariwisata negara Jepang.

**Bab III** akan berisikan eksplorasi dari latar belakang masalah mengenai :Dinamika Hubungan Bilateral Jepang-Indonesia, beserta kemunculan Kebijakan Bebas Visa ke Jepang.

**Bab IV** berisikan mengenai beberapa alasan mengapa Jepang memberikan *Exemption of Visa* atau pembebasan visa kepada Indonesia pada Era Shinzo Abe II tahun 2014.

**Bab V** merupakan bab terakhir pada penelitian ini, yang akan berisikan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis penelitian dan data yang dipaparkan